

## Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu Melalui Renja Tahun 2016-2021 dalam Peningkatan Pariwisata Studi Kasus Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Yohanes Susanto <sup>1)</sup>; Wita Hairani <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Public Administration Publik  
Departement of Administration Publik, STIA Bengkulu

<sup>2)</sup>Institut Teknologi Pagar Alam

Email: <sup>1)</sup>[yohannessusanto31@gmail.com](mailto:yohannessusanto31@gmail.com) ; <sup>2)</sup>[witahairani59@gmail.com](mailto:witahairani59@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [07 Desember 2023]

Revised [22 Desember 2023]

Accepted [29 Januari 2024]

### KEYWORDS

Kebijakan Pemerintah,  
Renja, Pariwisata

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 Melalui Renja Dalam Peningkatan Pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi resmi lembaga negara maupun yang diakses melalui internet. sekalipun ada juga beberapa program yang belum tercapai tetapi secara keseluruhan sudah tercapai dengan sangat baik, serta meningkatnya pelaku ekonomi kreatif baru dalam mengembangkan ekonomi kreatif, kemudian ditahun 2018-2019 program-program yang tercapai merupakan penyempurnaan dari program lanjutan dari tahun sebelumnya meliputi pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan wisata, pengembangan destinasi wisata serta pengembangan ekonomi kreatif, selanjutnya ditahun 2020-2021 dapat kita ketahui bahwasannya Bangsa Indonesia bahkan skala internasional mengalami wabah virus covid 19 maka dari itu pemerintah daerah Provinsi Bengkulu fokus menanggulangi pemulihan dampak pandemi covid 19.

### ABSTRACT

This research aims to evaluate the Regional Government Policy of Bengkulu Province for 2016-2021 through Renja to Improve Tourism. This research uses descriptive analysis methods. The data collection technique in this study uses the documentation method. The data used is secondary data sourced from books, literature, journals, reports and official information from state institutions as well as accessed via the internet. If we look at the progress each year through the planned programs, has been achieved and is right on target, even though there are also some programs that have not been achieved, overall they have been achieved very well, then in 2018-2019 the programs achieved were improvements to the follow-up program from the previous year including development tourism marketing, development of tourism products and services, development of tourist destinations and development of the creative economy, then in 2020-2021 we will know that the Indonesian nation, even on an international scale, is experiencing an outbreak of the Covid-19 virus, therefore the regional government of Bengkulu Province is focused on dealing with recovery from the impact of the Covid-19 pandemic. .

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi sumber daya alam yang sangat indah dan kaya akan keberagaman budaya yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai objek dan daya tarik wisata yang menarik kunjungan wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengatakan bahwa pembangunan Kepariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan nasional maupun lokal (Junaidi 2011: 2).

Serta untuk mendorong perkembangan pariwisata dalam otonomi daerah yang terdiri atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan pembangunan pariwisata yang dijalankan pemerintah diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha serta memelihara keberibadian bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup (Wardoyo 3003:40).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Susanto, Yohanes. 2020. Menyatakan bahwa proporsi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah diperoleh hasil sebesar 31,79 %, hal ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Bengkulu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan Provinsi itu sendiri. Ini berarti pemerintah Provinsi Bengkulu masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan secara lebih keras lagi pendapatan asli daerahnya, terutama pada sektor pariwisata karena di Provinsi Bengkulu destinasi pariwisatanya sangat banyak. Disisi historinya Provinsi Bengkulu memiliki peninggalan benteng Marlborough, Rumah Ibu Fatmawati, Rumah Bung Karno, Masjid Jamik, Tambang emas lelong Tandai dan masih banyak yang lainnya, dan dari sisi alamnya sangat beragam mulai dari laut, sungai dan pegunungan dari segi kebudayaan Provinsi Bengkulu memiliki Tabot.

Maka dari itu diperlukan campur tangan dan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam renja guna mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional, dan agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh tidak terlepas dari kontribusi atas peningkatan sektor maupun sub sektor ekonomi melalui kebijakan dan peran pemerintah yang dituangkan dalam renja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat dikurangi dan selanjutnya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

## LANDASAN TEORI

### EVALUASI

Menurut Nazara dalam Bappenas (2007 : 8) menyatakan bahwa evaluasi berfungsi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek dari suatu intervensi. Pada pelaksanaannya evaluasi memerlukan data dan metodologi yang lebih kompleks dari monitoring. Evaluasi sendiri dapat berupa dampak apakah proram mencapai tujuan awal, proses bagaimana program dilaksanakan dan apa saja keuntungan yang diterima oleh peserta atau juga analisa biaya dari program itu sendiri. Lalu untuk mendapatkan evaluasi yang baik diperlukan data yang valid sebagai acuan dan melakukan perencanaan evaluasi awal seperti menetapkan tujuan, metodologi, jadwal, dan pembiayaan. Kemudian metode yang paling baik dalam evaluasi adalah kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif.

Menurut Suharyadi dalam Bappenas (2007 : 80) Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk

keperluan pemangku kepentingan. Sedangkan Wahab (1997 : 14) Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## KEBIJAKAN

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “ negara-kota” dan sansakerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara. (Dunn, 2000).

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. “ (Indiahono, 2009: 18).

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”(Abidin, 2008: 25).

Menurut Abidin, 2008: 25. Kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

## PEMERINTAH

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*publik policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat- syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).

Serta menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah. Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (dua pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

## RENJA

Menurut Husein Umar (2009:65) "Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan. Karena perencanaan atau rencana kerja adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa."

Sedangkan M. Nafarin (2009:4) "Rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan."

Serta Gunawan Adisaputro (2010:89) "Rencana kerja adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian.

## PARIWISATA

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Youti, (1991:103). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu *Pari* dan *Wisata*. *Pari* dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan *Wisata* dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "*reave*" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata "pariwisata" dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*Tour*"

Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.

Sedangkan menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri (2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi resmi lembaga negara maupun yang diakses melalui internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Objek Penelitian

Provinsi Bengkulu terletak diantara 2° - 16° - 3° - 31° Lintang Selatan dan 101° - 110° - 103° - 41° Bujur Timur, terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, Provinsi ini dilintasi oleh pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari Utara hingga bagian Selatan Pulau Sumatera. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Lampung dan Samudera Hindia, disebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi. Provinsi Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta dibeberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil.

## **Kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021**

Kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Renja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2021 merupakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu maupun oleh partisipasi masyarakat Provinsi Bengkulu. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2021 harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2021 merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021 dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021.

Untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu perencanaan kinerja tahunan untuk tercapainya tujuan pelayanan publik bagi Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu maka Renja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2021 dimaksudkan untuk mengefektifkan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dicapai

## **Landasan Hukum Kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Tahun 2021, menggunakan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 18);
14. Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;
15. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R. 308.BAPPEDA Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

### **Maksud dan Tujuan Kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021**

#### **1. Maksud**

Kebijakan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk dijadikan suatu dokumen Perencanaan Operasional Tahunan serta sebagai pedoman yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, serta sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2021.

#### **2. Tujuan**

Kebijakan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2021, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021
2. Untuk merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi tahun mendatang.
3. Menjadi dasar penyusunan anggaran belanja baik melalui APBD Provinsi maupun APBN.
4. Menjadi pedoman dan dasar bagi aparat Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas.
5. Sebagai wacana dalam menunjang program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tepat guna.
6. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

### **Kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 memiliki tujuan dan sasaran**

#### **1. Tujuan**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mempunyai visi **“Terwujudnya Provinsi Bengkulu sebagai destinasi berdaya saing yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif”**.

Untuk itu tujuan penyusunan rencana kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu adalah untuk menjadi landasan dan acuan bagi perencanaan anggaran pembangunan sektor pariwisata yang secara bertahap dapat dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini juga diharapkan akan menjadi alat ukur bagi pengendalian pelaksanaan pembangunan.

## 2. Sasaran

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Sasaran program ini adalah terlaksananya administrasi perkantoran (persuratan, komunikasi, penyediaan bahan administrasi, penatausahaan, kearifan dan inventarisir Barang Milik Daerah, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan website).
- b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
Sasaran program ini adalah terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.
- c) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  
Sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur atau aparatur yang mengikuti diklat baik formal maupun non formal.
- d) Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja  
Sasaran program ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen anggaran perencanaan dan pelaporan dan terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pariwisata.
- e) Program Pengembangan Pemasaran pariwisata  
Sasaran Program ini adalah melaksanakan pendataan dan analisa pemasaran, Pengembangan promosi dan event-event seoptimal mungkin guna menarik kunjungan wisata baik nusantara maupun mancanegara.
- f) Program Pengembangan Destinasi  
Sasaran Program ini adalah mengembangkan potensi pariwisata Provinsi Bengkulu menjadi destinasi unggulan melalui pemeliharaan dan perawatan objek wisata dan aset pemerintah dan workshop peningkatan tata kelola daya tarik wista.
- g) Program Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata  
Sasaran program ini adalah mengembangkan SDM atau pelaku industri pariwisata secara profesional, melalui optimalisasi Duta Wisata dalam promosi pariwisata, dan pelatihan bagi pemandu wisata.
- h) Program Pengembangan ekonomi kreatif  
Sasaran program ini adalah meningkatkan pelaku ekonomi kreatif baru dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pengembangan kemitraan ekonomi kreatif, pembinaan kampung basurek dan pendataan ekonomi kreatif kepariwisataan.

**Secara umum Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu telah melaksanakan beberapa program/kegiatan pada tahun 2016-2019 diantaranya :**

### 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- a) Peningkatan Promosi pariwisata melalui kegiatan event pariwisata regional, nasional dan internasional.
- b) Menyediakan bahan-bahan informasi dan publikasi pariwisata daerah, baik cetak maupun audio-visual.
- c) Terselenggaranya event-event pariwisata unggulan daerah provinsi Bengkulu bersekala lokal, regional, nasional dan internasional
- d) Terlaksananya promosi pariwisata dan budaya melalui berbagai media komunikasi promosi (Pameran, Internet, Elektronik, Website, media cetak dll).

### 2. Program Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata

- a) Pengembangan sumber daya dan investasi pariwisata di Provinsi Bengkulu.
- b) Peningkatan daya saing produk dan industri pariwisata Provinsi Bengkulu
- c) Penguatan data base bidang pengembangan produk dan pelayanan pariwisata.

### 3. Program Pengembangan Destinasi Wisata

- a) Optimalisasi pemeliharaan dan perawatan objek pariwisata dan aset pemerintah;
- b) Terlaksananya pembayaran Hutang Gedung Kreasi Budaya daerah
- c) Pengembangan Agro Wisata
- d) Optimalisasi Desa Wisata.

### 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a) Pengembangan Ekonomi kreatif pelaku seni berbasis EKMDI dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kepariwisata serta Pengembangan Ekonomi berbasis seni budaya;
- b) Bimbingan teknis Ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek kampung basurek;
- c) Melaksanakan aransment dan parade lagu daerah.

## Pembahasan

### Evaluasi Kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil evaluasi penulis bahwa Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rencana kerja dinas pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 jika dilihat perkembangan tiap tahunnya melalui program yang dicanangkan sudah tercapai dan tepat sasaran, memang tidak dapat dipungkiri ada juga beberapa program yang belum tercapai tetapi secara keseluruhan sudah tercapai dengan sangat baik.

Dapat dilihat capaian apa saja, berdasarkan tahun 2016-2017 program yang ada meliputi meningkatnya pengembangan destinasi seperti dikawasan pantai panjang sebelumnya dikawasan pantai panjang ini tidak ada area jogging track pada tahun ini dibangun tempat jogging track disepanjang bibir pantai panjang, dibangunnya ikon yang bertuliskan pantai panjang, dibangunnya pos polisi yang berdampak pada menimbulkan rasa aman bagi pengunjung dan dibangunnya area sport senter yang bisa digunakan sebagai arena olah raga bagi masyarakat setempat dan bahkan seluruh pemuda yang ada di Provinsi Bengkulu agar giat berolah raga. Meningkatnya kemudahan investasi dan profesionalisme sumberdaya manusia seperti bagi investor dalam hal pengurusan perizinan diberikan kemudahan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses perizinan, serta meningkatnya pelaku ekonomi kreatif baru dalam mengembangkan ekonomi kreatif, seperti munculnya usahawan dikalangan anak muda.

Kemudian ditahun 2018-2019 program-program yang tercapai merupakan penyempurnaan dari program lanjutan dari tahun sebelumnya meliputi pengembangan pemasaran pariwisata seperti fokus terhadap keberlanjutan (*sustainability*), penggunaan teknologi digital dan internet misalnya *virtual reality*, *influencer marketing*, serta *industry* dan *cross-industry partnerships*, pengembangan produk dan pelayanan wisata, pengembangan destinasi wisata serta pengembangan ekonomi kreatif seperti dikawasan pantai kualo dibangun kawasan kota tua sehingga ini bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung, serta menggeliatnya di setiap daerah yang ada di Provinsi Bengkulu penggiat dan pelaku wisata tergabung dalam desa wisata, sehingga ini menarik perhatian keragaman tempat-tempat wisata untuk dikunjungi dan menarik minat wisatawan.

Selanjutnya ditahun 2020-2021 dapat kita ketahui bahwasannya Bangsa Indonesia bahkan skala Internasional mengalami wabah virus covid 19 yang melemahkan seluruh tatanan yang ada dipemerintahan secara keseluruhan, sehingga sektor pariwisata pun menjadi terdampak dari virus covid 19 ini, karena benar-benar lumpuh bahkan sampai pelaku pariwisata mulai dari perhotelan, restoran dan tempat destinasi wisata sampai tempat perbelanjaan oleh oleh khas daerah mengalami penutupan. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah untuk melaksanakan pemulihan dari pada akibat covid 19 ini. Dikarenakan pada tahun ini pemerintah daerah Provinsi Bengkulu tidak dapat secara maksimal untuk melaksanakan program kerja yang telah dicanangkan sebelumnya sehingga pemerintah daerah Provinsi Bengkulu berfokus secara bersama-sama menanggulangi pemulihan dampak pandemi covid 19.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Evaluasi Kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 sudah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan program-



program yang telah diselenggarakan dalam rencana kerja. Dimana Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu ini berisikan kebijakan, strategi, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan di sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu, yang meliputi beberapa aspek seperti pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan perencanaan, pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, produk industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sehingga dalam pelaksanaannya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 ini perlu ditunjang dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut untuk setiap item program/kegiatannya. Dukungan yang optimal dari pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan *stakeholder* pariwisata sangat diharapkan dapat mendorong terwujudnya kemajuan potensi sumber daya alam dan budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turut serta memajukan perekonomian daerah yang mandiri, melalui sektor pariwisata. Hanya saja tetap ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan setiap program yang telah dicangkan terutama pada tahun 2020-2021 akibat pandemi covid 19.

### Saran

Agar terimplementasikan dengan baik setiap program yang ada dan yang mengalami kendala akibat pandemi sebagai bencana yang global Sehingga kedepan diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu fokus dan bangkit kembali dalam menata dan melaksanakan sektor pariwisata melalui setiap program kerja yang telah dicanangkan ditengah mulai pulihnya kondisi covid 19.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2008. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Adisaputro, Gunawan. 2010. "Anggaran Perusahaan". Edisi 2. Yogyakarta: BPFE Pemasaran), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- A.J Burkat dalam Damanik (2006) *Perencanaan Ekowisata*.
- BAPPENAS, 2007. *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, November 2007
- BAPPENAS, 2007. *Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*, Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM BAPPENAS.
- Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, 1992, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 11.
- Damanik, J., & Weber, H. (2006). *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Puspar UGM dan Andi.
- Dunn,William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press Inu
- Husein Umar. 2009. *Rencana Kerja Perusahaan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009) *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Junaidi, Erni. 2019. "Pengaruh Daya Tarik Wisata Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Wisata Berkunjung Ke Taman Hutan Kota Di Kota Langsa". *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 1. No. 2
- Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R. 308.BAPPEDA Tahun 2020 *tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021*.
- Kencana Syafiiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 2011, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 8.
- Nafarin, M.2009. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Pitana, I.Gede dan Gayatri, Putu G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 *tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)*;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4287)*;

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)* ;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)*;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 *Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)*;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 *Tentang Penetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)*;
- Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* ;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 *tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 *tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590)*;
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 *tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020)*;
- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 *tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 18)*;
- Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu*;
- Susanto, Y., Suminar, P., & Suharto, S. (2020). Policy Analysis of The Regional Government of Bengkulu Province in Supporting Fiscal Independence in The Autonomy Era. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 1(4), 243-255. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v1i4.182>
- Wardoyo, Wisnu tri. (2019). *Kecamatan Polanharjo Dalam Angka 2019*. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten
- Yoeti, Oka A. 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: ANGKASA